

## BAB V

### KESIMPULAN

Negara Republik Indonesia dalam pengelolaan keuangan Daerah telah memilih sistem pendekatan kinerja dalam penyusunan APBD. Oleh karena Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian dari APBD, maka penyusunan Anggaran Belanja DPRD harus menggunakan pendekatan kinerja.

Berdasarkan uraian pada bab IV di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan kinerja belum dapat mempengaruhi dalam penyusunan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2003, khususnya Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2003. Hal ini dapat diketahui belum dipenuhi persyaratan pendekatan kinerja dalam penyusunan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 khususnya Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2003, yaitu persyaratan materiil dan persyaratan prosedural.

Persyaratan materiil yang dimaksud adalah belum dibuatnya : (a) SAB, (b) Tolok Ukur Kinerja, dan (c) Standar Biaya.

Sedangkan persyaratan prosedural yang dimaksud adalah :

1. Sekretariat DPRD belum membuat Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
2. Akibat belum dibuatnya RASK untuk Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2003, maka Tim Anggaran Eksekutif tidak dapat memutuskan berapa besar alokasi dana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 yang dapat diajukan menjadi Rancangan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2003.

Akibat belum terpenuhinya persyaratan materiil dan persyarata prosedural, maka :

1. Adanya anggaran melebihi alokasi.
2. Adanya tumpang tindih anggaran.
3. Adanya anggaran yang tidak dianggarkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### L BUKU

- Agus, Amin. 2001. Akuntansi Manajemen dan Pengendalian Analisis Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Bukit Tinggi. Program Studi Magister Manajemen UGM, Yogyakarta.
- Abdul, Wahab, solihin dan Fadlilah Putra, Masa Depan Otonomi Daerah. Surabaya : Penerbit SIC, 2002.
- Budihardjo, Mirian, Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta : Gramedia, 1982.
- Bastian, Indra, Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Yogyakarta : BPFE, Cet. 1. Yogyakarta : BPFE, 2001.
- Baswir, Revrison, Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Cet. 3. Yogyakarta : BPFE, 1997.
- Djamaluddin, Arief. Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran. Cet. 4. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982.
- Elmi, Bachrul. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia. Jakarta : Gramedia, 1982.
- Fauzi, Ahmad. Peranan Pajak, Retribusi Daerah Terhadap PAD, dan APBD Serta Efisiensi Pengeluarannya (Kabupaten Banjar). Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta : UGM Yogyakarta.
- Istanto, Sugeng. Usulan Penelitian (Uraian Tambahan Petunjuk Penulisaan Usulan Penelitian dan Tesis Program Pasca Sarjana UGM Khusus untuk Program Studi Hukum. Yogyakarta : 2001.
- Manuliang, M., Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah. Jakarta : Pembangunan. 1973.
- Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta : Pusta Studi Hukum Fakultas Hukum UII. 1988.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi. 2002.
- \_\_\_\_\_, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002.

Riwo Kaho, Josef. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Cet. I. Jakarta : Rajawali. 1988.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Pres. 1986.

Tjokroamidjojo, Bintoro. Perencanaan Pembangunan. Cet. 4. Jakarta : Gunung Agung. 1981.

Widjaja. HAW., Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada. 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 1989.

## II. ARTIKEL

Jauhari, Thantowi. "Seputar Kontroversi". Solo Pos. (29 Januari 2003). Hlm. 4.

Basuki, Alif, dan Ahmad Rofik. "Kontroversi RAPBD 2003 Kota Solo". Solo Pos. (6 Maret 2003). Hlm. 4.

## III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 22 LN. No. 60. Tahun 1999. TLN. No. 3839.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PP. Nomor 105 LN No. 202 Tahun 2000. TLN. 4022.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. PP Nomor 108 Tahun 2000. LN. Nomor 109 Tahun 2000. TLN. 4027.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PP Nomor 110 Tahun 2000. LN. Nomor 211. TLN. 4029.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PP Nomor 20 Tahun 2001. LN. Nomor 41 Tahun 2001. TLN. 4090.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun. PP Nomor 28 Tahun 2003. LN. Nomor 62 Tahun 2003. LN. 4294.

Departemen Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Semarang. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2003 tentang APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2003 dan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2003 tentang Penjabaran APBD Tahun 2003. SK Gubernur Jawa Tengah. No. 093/11113 Tahun 2003.

Karanganyar. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Daerah Tingkat II Karanganyar. Keputusan Bupati KDH Tingkat II Karanganyar No. 21 Tahun 1999. Lembaran Daerah No. 54 Tahun 1999.

Karanganyar. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 188.4/1/1999 Tahun 1999 Lembaran Daerah Nomor 54 Tahun 1999.

Karanganyar. Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003. Perda Nomor 1 Tahun 2003.

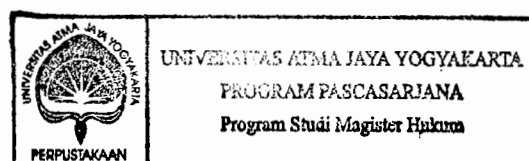
Karanganyar. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001. Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2001.

Karanganyar. Keputusan Bupati Karanganyar Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003. Perda Nomor 1 Tahun 2003.

Karanganyar. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar. Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 188.4/11 Tahun 2002 Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2002.

Karanganyar. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar. Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 176.4/3/2003.

Karanganyar. Keputusan Bupati Karanganyar Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 954/5/2003.



Lampiran 1 :

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Keuangan	Ketua-Ketua	Wakil	Sekretaris	Anggota
I	Penghasilan Tetap :				
	1. Uang representasi Daerah	60% dari gaji pokok Kepala Ketua DPRD	90% dari Uang Representasi		90% dari Uang Representasi
	2. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras	= Ketentuan yang berlaku bagi PNS	= Ketentuan yang berlaku bagi PNS	= Ketentuan yang berlaku bagi PNS	= Ketentuan yang berlaku bagi PNS
	3. Uang paket	25% dari Uang Representasi	25% dari Uang Representasi	25% dari Uang Representasi	25% dari Uang Representasi
	4. Tunjangan jabatan	50% dari Uang Ueprsentasi	50% dari Uang Representasi	50% dari uang representasi	50% dari uang representasi
	5. Tunjangan komisi	20% dari tunjangan jabatan ketua DPRD	15% dari tunjangan jabatan ketua DPRD	15% dari tunjangan jabatan ketua DPRD	10% dari tunjangan jabatan ketua DPRD
	6. Tunjangan khusus	ada	ada	ada	ada
	7. Tunjangan perhaikan penghasilan	= Ketentuan yang berlaku bagi PNS	= Ketentuan yang berlaku bagi PNS	= Ketentuan yang berlaku bagi PNS	= Ketentuan yang berlaku bagi PNS
II	Tunjangan panitia	15% dari tunjangan jabatan ketua DPRD	10% dari tunjangan jabatan ketua DPRD	10% dari tunjangan jabatan ketua DPRD	5% dari tunjangan jabatan ketua DPRD
III	Tunjangan Kesejahteraan				
	1. Asuransi kesehatan	= Ketentuan yang berlaku bagi PNS golongan IV	= Ketentuan yang berlaku bagi PNS golongan IV	= Ketentuan yang berlaku bagi PNS golongan IV	= Ketentuan yang berlaku bagi PNS golongan IV
	2. Uang duka wafat	3 x Uang Representasi	3 x Uang Representasi	3 x Uang Representasi	3 x Uang Representasi
	3. Uang duka tewas	6 x Uang Representasi	6 x Uang Representasi	6 x Uang Representasi	6 x Uang Representasi

Sumber: PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD

**Lampiran 2****BIAYA KEGIATAN DPRD KABUPATEN / KOTA**

No	Pendapatan Asli Daerah	Besarnya Biaya Kegiatan
1.	Sampai dengan Rp 2 Milyar	Paling rendah Rp 75 Juta dan paling tinggi sebesar 5%
2.	Rp 2 Milyar s.d. Rp 5 Milyar	Paling rendah Rp 100 Juta dan paling tinggi sebesar 4%
3.	Rp 5 Milyar s.d. Rp 10 Milyar	Paling rendah Rp 200 Juta dan paling tinggi sebesar 3%
4.	Rp 10 Milyar s.d. Rp 20 Milyar	Paling rendah Rp 300 Juta dan paling tinggi sebesar 2%
5.	Rp 20 Milyar s.d. Rp 50 Milyar	Paling rendah Rp 400 Juta dan paling tinggi sebesar 1%
6.	Rp 50 Milyar s.d. Rp 150 Milyar	Paling rendah Rp 500 Juta dan paling tinggi sebesar 0,75%
7.	Rp 150 Milyar s.d. Rp 500 Milyar	Paling rendah Rp 1,125 Miliar dan paling tinggi sebesar 0,35%
8.	Diatas Rp 500 Milyar	Paling rendah Rp 75 Juta dan paling tinggi sebesar 5%

Sumber : PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD

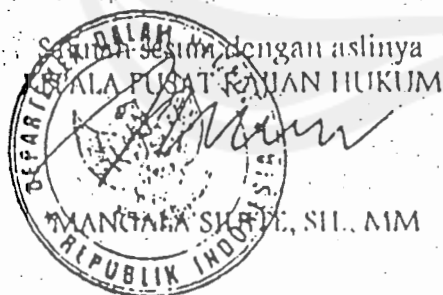
Berikut ini adalah contoh rumusan arah dan kebijakan umum APBD Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Penyelenggaraan Sekolah Dasar:

1. Ketersediaan Kurikulum Nasional dan Terselarnya Kurikulum Lokal
2. Keterlaksanaan Kurikulum Nasional dan Kurikulum Lokal pada tingkat pencapaian 90%
3. Peningkatan Daya Serap Kurikulum Nasional dan Kurikulum Lokal pada tingkat pencapaian 75%
4. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Anak Didik pada tingkat pencapaian 75%
5. Peningkatan Angka Partisipasi Murni, Angka Pendaftaran Siswa dan *Survival Rate*
6. Penurunan Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang
7. Peningkatan Angka Kelulusan pada tingkat pencapaian 90%
8. Peningkatan Guru Berkualifikasi pada tingkat pencapaian 90%
9. Peningkatan Guru Berkeahlian pada tingkat pencapaian 50%
10. Peningkatan Rasio Guru dengan Siswa pada tingkat pencapaian 1 : 40
11. Ketersediaan Lahan, Bangunan, Peralatan dan Sarana Olahraga.
12. Peningkatan Rasio Buku Teks dengan Siswa pada tingkat pencapaian 1 : 1.
13. Ketersediaan Struktur, Personalia dan Urutan Tugas.
14. Ketersediaan Pembiayaan Anggaran yang berasal dari Pemerintah dan Swadaya Masyarakat.
15. Peningkatan Kehadiran Guru, Tenaga Administrasi, Tenaga Kependidikan Lainnya dan Siswa pada tingkat pencapaian 90%.
16. Peningkatan Tertib Administrasi dan Kerneria Sekolah pada tingkat pencapaian 90%.
17. Mengupayakan adanya Dukungan BP3, Perhatian Orangtua, Peranserta Tokoh Masyarakat, dan Peranserta Dunia Usaha.

MENTERI DALAM NEGERI

td

HARI SABARNO





CONTOH RUMUSAN

Berikut ini adalah contoh rumusan strategi dan prioritas APBD yang menunjukkan contoh rumusan arah dan kebijakan umum APBD Bidang Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

1. Contoh Arah dan Kebijakan Umum APBD

- Peningkatan Guru Berkualifikasi pada tingkat pencapaian 90%
- Peningkatan Guru Berkeahlian pada tingkat pencapaian 80%
- Peningkatan Rasio Guru dengan Siswa pada tingkat pencapaian 1 : 40

Contoh Strategi dan Prioritas APBD

- Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Penempatan Guru
- Pengangkatan dan Penempatan Guru
- Pembinaan dan Pengembangan Karier Guru
- Peningkatan Kemampuan Profesional Guru

2. Contoh Arah dan Kebijakan Umum APBD

- Ketersediaan Lahan, Bangunan, Peralatan dan Sarana Olahraga

Contoh Strategi dan Prioritas APBD

- Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, Pendaayagunaan Sarana dan Prasarana
- Pendaayagunaan Lahan,
- Pembangunan, Pendaayagunaan dan Perawatan Bangunan,
- Pengadaan, Pendaayagunaan dan Perawatan Peralatan,
- Perawatan Sarana Olahraga

MENTERI DALAM NEGERI

td

HARI SABARNO,



Sajian sesuai dengan aslinya  
KEPALA PUSAT KAJIAN HUKUM

MANGALASAPUTE, SH., MM

DAFTAR HARGA SATUAN DASAR UPAH, BAHAN DAN PERALATAN

PROYEK : PROYEK PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN : 2003

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	HARGA (Rp.)
	<b>UPAH :</b>			
1.	Buruh tak terlatih	L.101	hari / orang	18,500.00
2.	Buruh semi terlatih	L.102	hari / orang	18,500.00
3.	Buruh terlatih	L.106	hari / orang	21,000.00
4.	Tukang	L.073	hari / orang	23,500.00
5.	Mandor	L.061	hari / orang	21,000.00
6.	Operator terlatih	L.081	hari / orang	23,500.00
7.	Operator semi terlatih	L.082	hari / orang	21,000.00
8.	Sopir	L.091	hari / orang	23,500.00
9.	Mekanik terlatih	L.071	hari / orang	23,500.00
	<b>BAHAN :</b>			
1.	Pasir beton	M.041	m3	84,375.00
2.	Batu belah	M.010	m3	81,560.00
3.	Batu pecah 3 - 5 cm	M.023	m3	106,875.00
4.	Batu pecah 2 - 3 cm	M.024	m3	123,750.00
5.	Batu pecah 1 - 2 cm	M.025	m3	135,000.00
6.	Batu pecah 0,5 - 1 cm	M.026	m3	140,625.00
7.	Agregat kasar	M.03	m3	180,500.00
8.	Agregat halus	M.04	m3	190,500.00
9.	Kerikil sungai dipungut	MR. 12	m3	55,000.00
10.	Pasir pasang	M.042	m3	73,125.00
11.	Pasir urug	M.040	m3	60,185.00
12.	Tanah keras	M.043	m3	24,750.00
13.	Aspal curah	M.061/M.10	kg	2,450.00
14.	Aspal Bitument	-	kg	2,850.00
15.	Semen ( 50 kg )	M.080	zak	30,375.00
16.	Filler	M.05	kg	350.00
17.	Alat bantu	M.170	set	86,250.00
18.	Minyak bakar	M.055	lt	1,100.00
19.	Solar	-	lt	1,650.00
20.	Bensin	-	lt	1,850.00
21.	Olie / Pelumas	-	lt	15,000.00
22.	Besi beton dan kawat beton	M.167	kg	3,940.00
23.	Paku jembatan	M.166	kg	5,625.00
24.	Kayu begesting	M.180	m3	450,000.00
25.	Glugu pj. 3 m, 0 25 cm ( perancah )	-	bt	60,000.00
26.	Kereb type A ( L )	-	m'	41,625.00
27.	Kereb type B ( I )	-	m'	20,925.00
28.	Kereb type BM	-	m'	18,000.00
29.	Paving kawung tebal 8 cm K.350	-	m2	29,785.00
30.	Paving kawung tebal 6 cm	-	m2	29,785.00
31.	Buis beton 0 50 cm	-	m'	47,815.00
32.	Buis beton 0 60 cm	M.031	m'	67,500.00
33.	Buis beton 0 20 cm	-	m'	18,565.00
34.	Buis beton U 20 cm	-	m'	13,500.00
35.	Pipa Galvanis 0 3"	-	m	42,185.00
36.	Besi siku	-	kg	

Standar Analisa Belanja

JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN BILAYA (LUMPΣUM) (Rp)	PERINCIAN				KETERANGAN
			BIAYA PENGNYAPAN (Rp)	BIAYA MEKAN (Rp)	UANG TRANS PORT LOKAL (Rp)	UANG SAKI	
<p>Perjalanan Dinas</p> <p>biaya Uang</p> <p>rian yang melakukan</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam</p> <p>geri bagi :</p> <p>Pejabat/Pegawai Negeri</p> <p> Sipil</p> <p>Ketua/Wakil Ketua dan</p> <p>Anggota DPRD Kota</p> <p>Surakarta</p>	1. Luar Jawa :						<p>1. Uang transport pergi pulang dari tempat tugas ke tujuan dihitung tersendiri</p> <p>2. Untuk ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD disamakan dengan golongan IV PNS (PF 110 2000).</p>
	- A (GOL IV)	Rp. 600.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-	
	- B (GOL III)	Rp. 485.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 00.000,-	
	- C (GOL II)	Rp. 390.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	
	- D (GOL I)	Rp. 315.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 60.000,-	
	2. DKI - JABAR - JATIM:						
	- A (GOL IV)	Rp. 575.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 25.000,-	
	- B (GOL III)	Rp. 485.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 00.000,-	
	- C (GOL II)	Rp. 390.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	
	- D (GOL I)	Rp. 315.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 60.000,-	
	3. Rata-rata (Jurang & DIY) ( Menginap :						
	- A (GOL IV)	Rp. 320.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-	
	- B (GOL III)	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	
	- C (GOL II)	Rp. 175.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	
	- D (GOL I)	Rp. 135.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	
	4. Perjalanan pulang pergi lebih dari 5 jam ( tidak menginap :						
- A (GOL IV)	Rp. 120.000,-	Rp. -,-	Rp. 50.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-		
- B (GOL III)	Rp. 100.000,-	Rp. -,-	Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-		
- C (GOL II)	Rp. 75.000,-	Rp. -,-	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-		
- D (GOL I)	Rp. 60.000,-	Rp. -,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-		

## I. INDEKS BLAYA KEGIATAN

JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	CETARAN
Penerimaan Tamu Tamu Luar Negeri dan dalam Negeri	1 Jamuan minum dan makanan kecil (box)	Orang	Rp.	5.000,-	1 kali jamuan
	2 Jamuan minum dan makanan kecil (prasmanan)	Orang	Rp.	7.500,-	1 kali jamuan
	3 Jamuan makan (prasmanan)	Orang	Rp.	20.000,-	1 kali jamuan
Penerimaan Tamu di Hotel Berbintang	1 Jamuan makan (prasmanan) Hotel bintang 5	Orang	Rp.	40.000,-	1 kali jamuan
	2 Jamuan makan (prasmanan) Hotel bintang 4	Orang	Rp.	35.000,-	1 kali jamuan
	3 Jamuan makan (prasmanan) Hotel bintang 3	Orang	Rp.	30.000,-	1 kali jamuan
	4 Jamuan makan (prasmanan) Hotel bintang 2	Orang	Rp.	25.000,-	1 kali jamuan
Penerimaan Tamu di Hotel Melati	1 Jamuan makan (prasmanan)	orang	Rp.	22.500,-	1 kali jamuan
Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan Resepsi	1 Jamuan minum dan makanan kecil (box)	Orang	Rp.	4.500,-	1 kali jamuan
	2 Jamuan minum dan makanan kecil (prasmanan)	Orang	Rp.	6.000,-	1 kali jamuan
	3 Jamuan makan (perseorangan)				
	a. Pagi (box)	Orang	Rp.	8.000,-	1 kali jamuan
	b. Siang (box)	Orang	Rp.	8.000,-	1 kali jamuan
4 Jamuan makan (prasmanan)	Orang	Rp.	20.000,-	1 kali jamuan	
Rapat Rutin/Penataran/Pen arahan/Kursus.	1. Jamuan minum dan makanan kecil (box)	Orang	Rp.	3.500,-	1 kali jamuan
	2. Jamuan makan :				
	a. Pagi	Orang	Rp.	7.500,-	1 kali jamuan
	b. Siang	Orang	Rp.	7.500,-	1 kali jamuan
c. Prasmanan	Orang	Rp.	15.000,-	1 kali jamuan	



# RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA (RASK)

Kabupaten Karanganyar  
Tahun Anggaran 2003

Unit Kerja : Dinas Perindag Penanaman Modal dan Koperasi .....

Dana : Rp. 2.409.256.000,-- .....

<b>RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</b>		<b>S 1</b>
<b>Kode</b>	<b>Satuan Kerja DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI</b>	<b>TH. 2003</b>
<b>Bidang Kewenangan</b>		
<b>Administrasi Umum dan Pemerintah</b>		
<b>Visi</b>		
"Terwujudnya Kabupaten Karanganyar sebagai daerah Industri sekaligus daerah naga yang tangguh dengan ditunjang peningkatan Investasi serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( KUKM ) sebagai penggerak utama menuju kemandirian ekonomi daerah "		
<b>Misi</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>1. Menumbuh kembangkan perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor Industri, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi yang dapat menciptakan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan.</li><li>2. Industri salah satu penggerak pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan akses teknologi, produksi, permodalan dengan perkuatan sarana produksi, promosi, permodalan dengan perkuatan sarana produksi, promosi, kerjasama kemitraan, study banding &amp; temu usaha.</li><li>3. Terjaminnya distribusi barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat, perlindungan konsumen serta peningkatan ekspor non migas daerah.</li><li>4. Meningkatkan peran Koperasi dan UKM melalui pembinaan/ bimbingan, perkuatan modal.</li><li>5. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya manusia secara efisien dan berwawasan lingkungan serta menerapkan kemudahan dalam perijinan yang dapat menarik Investor untuk menanamkan modalnya di Karanganyar.</li></ul>		
<b>Tujuan</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan sektor Industri khususnya Industri Kecil dan Menengah lebih dapat berkembang, berkualitas, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Industri.</li><li>2. Meningkatkan kelancaran kebutuhan barang pokok &amp; strategis serta barang umum lainnya pada tingkat harga yang wajar serta meningkatkan perdagangan ekspor import non migas.</li><li>3. Mengembangkan penanaman modal dan dunia usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluang kesempatan kerja dan berusaha dan pendapatan daerah.</li><li>4. Meningkatkan ketertiban administrasi organisasi dan usaha bagi koperasi serta meningkatkan perkuatan permodalan yang dapat menambah usaha sehingga kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah bertambah.</li></ul>		

**Sasaran**

- a. Tersedianya jumlah unit usaha dan terwujudnya peningkatan jumlah investasi serta penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar, menengah dan kecil baik formal dan non formal.
- b. Adanya ketenangan berusaha dan tersedianya kelancaran arus barang dan jasa serta meningkatnya kegiatan ekspor non migas baik jenis volume maupun nilainya dan impor bahan baku
- c. Terpenuhinya kebutuhan penanaman modal, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang semakin luas serta tersedianya produksi barang dan jasa untuk kebutuhan pasar dalam dan luar negeri.
- d. Terwujudnya klasifikasi koperasi, unit simpan pinjam/koperasi simpan pinjam serta meningkatnya pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah/pengusaha yang tangguh dan adanya kemitraan pengusaha kecil menengah dengan koperasi.


**Tugas Pokok**

Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.

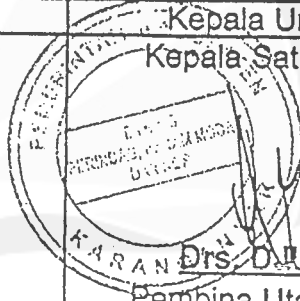
**Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Perkoperasian dan ketatausahaan.
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perindustrian, Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan Penanaman Modal dan Koperasi.
- d. Pengkoordinasian dalam bidang Perindustrian, Perdagangan Penanaman dan Koperasi yang meliputi Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Perkoperasian dan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Katatan


PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PERINDUSRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL  
Karanganyar, 15 Desember 2015  
  
**Drs. MUMADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 160015680

Formulir S1.

RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR		S2
Kode	Unit Kerja DINAS PERINDAG, PENDAL DAN KOPERASI	Th. 2003
Program		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan sarana prasarana untuk produktifitas dan efisiensi.</li> <li>2 Pengembangan sarana dan prasarana Industri Kecil.</li> <li>3 Pengembangan sarana dan prasarana sektor Perdagangan.</li> <li>4 Peningkatan ekspor non migas.</li> <li>5 Pengembangan Penanaman Modal.</li> <li>6 Penguatan Koperasi Usaha Kecil Menengah.</li> <li>7 Peningkatan produktifitas Koperasi Usaha Kecil Menengah.</li> </ol>		
Catatan		Kepala Unit Kerja Kepala Satuan Kerja  Drs. DJUMADI Pembina Utama Muda NIP. 160015680

Formulir S2



		Halaman 1
RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR		S2A
Kode	Unit Kerja DINAS PERINDAG, PENDAL DAN KOPERASI	TH. 2003
Program		
PENINGKATAN SARANA PRASARANA UNTUK PRODUKTIFITAS DAN EFISIENSI		
Kegiatan		
1	Rehab dan perluasan bangunan Gedung Kantor.	
Catatan	Kepala Satuan Kerja	
	 <b>Drs. DJUMADI</b> Pembina Utama Muda NIP. 160015880	

Formulir S2A.

		Halaman 2
RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR		S2A
Kode	Unit Kerja DINAS PERINDAG, PENDAL DAN KOPERASI	TH. 2003
Program		
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI KECIL		
Kegiatan		
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pemberdayaan dan peningkatan peranan wanita di Desa Kebak dan Pulosari Kecamatan Kebakkramat (2 lokasi)</li><li>2 Peningkatan mutu produk penguatan prasarana produksi industri Agro/ IK Pengolahan Makanan.</li><li>3 Peningkatan mutu produk dan penguatan prasarana produksi industri kecil Mebel Kayu Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat.</li><li>4 Study banding perajin genteng Kab Karanganyar ke Industri Kecil . Genteng Jatiwangi Kab. Majalengka Jawa Barat.</li><li>5 Peningkatan mutu produk dan penguatan prasarana produksi IK. Kerajinan Rotan Desa Berjo Kec. Ngargoyoso.</li></ol>		
Catatan		Kepala Satuan Kerja
		 Drs. DJUMADI Pembina Utama Muda NIP. 160015680

**RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**S2A**

Kode

Unit Kerja  
**DINAS PERINDAG, PENDAL DAN KOPERASI**

TH. 2003

Program

**PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKTOR PERDAGANGAN**

Kegiatan

- 1 Pemantauan harga dan pengendalian barang pokok/ strategis
- 2 Pembinaan dan pengembangan pedagang kecil.
- 3 Pembinaan Kemetrolagian dan perlindungan konsumen.

Catatan

Kepala Satuan Kerja..



**Drs. DJUMADI**

Pembina Utama Muda

NIP. 160015680

<b>RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR</b>		<b>S2A</b>
Kode	Unit Kerja <b>DINAS PERINDAG, PENDAL DAN KOPERASI</b>	TH. 2003
Program <b>PENINGKATAN EKSPORT NON MIGAS</b>		
Kegiatan		
1 Promosi produksi Dalam Negeri Pameran Produksi Indonesia (PPI) di Jakarta.		
2 Promosi produksi Dalam Negeri ( Pameran) Keg. PIKK Ds. Lopait Tuntang Semarang.		
3 Promosi Produksi Dalam Negeri di Bali		
Catatan		Kepala Satuan Kerja
		 <b>Drs. DJUMADI</b> Pembina Utama Muda NIP. 160015680

Formulir S2A.

RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

S2A

Kode

Unit Kerja  
DINAS PERINDAG, PENDAL DAN KOPERASI

TH. 2003

Program

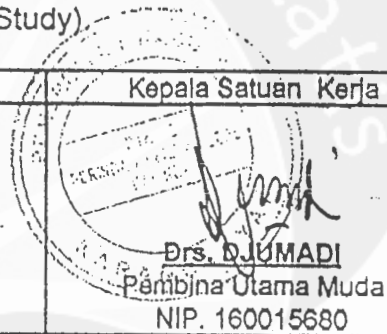
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan

- 1 Forum komonikasi dalam rangka peningkatan Penanaman Modal.  
Kecil Pengolahan Makanan Kabupaten Karanganyar.
- 2 Monitoring dan evaluasi perusahaan PMA/ PMDN.
- 3 Sosialisasi Penerapan ISO 9000.
- 4 Pelatihan pembuatan proposal ( Feasibility Study)

Catatan

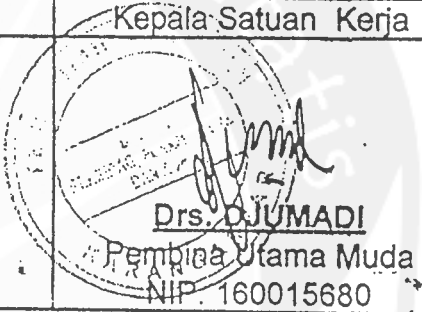
Kepala Satuan Kerja



Dr. D. UMADI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 160015680

		Halaman 6
<b>RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR</b>		<b>S2A</b>
Kode	Unit Kerja <b>DINAS PERINDAG, PENDAL DAN KOPERASI</b>	TH. 2003
Program <b>PENGUATAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH</b>		
Kegiatan		
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pengembangan sistim pemasaran hasil produksi UKM.</li><li>2 Peningkatan kualitas administrasi dan usaha simpan pinja Koperasi.</li></ol>		
Catatan		Kepala Satuan Kerja
		 <b>Drs. DJUMADI</b> Pembina Utama Muda NIP. 160015680

Formulir S2A.

		Halaman 7
RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR		S2A
Kode	Unit Kerja DINAS PERINDAG, PENDAL DAN KOPERASI	TH. 2003
Program PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH		
Kegiatan		
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pengembangan diversifikasi usaha bagi KUKM.</li><li>2 Pendampingan perkuatan modal KUKM.</li></ol>		
Catatan		Kepala Satuan Kerja
		 Drs. OJUMADI Pembina Utama Muda NIP. 160015680

Formulir S2A.

RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

S 3

UNIT KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI

TH. 2003

Ringkasan Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>218.975.000</b>
	<b>RESTRIBUSI DAERAH</b>	<b>63.165.000</b>
106 01 1 2 33	Surat Ijin Usaha Perdagangan	17.980.000
106 01 1 2 33 01	Surat Ijin Usaha Perdagangan	17.980.000
106 01 1 2 34	Tanda Ijin Usaha Industri	7.000.000
106 01 1 2 34 01	Tanda Ijin Usaha Industri	7.000.000
106 01 1 2 35	Tanda Daftar Gudang	2.985.000
106 01 1 2 35 01	Tanda Daftar Gudang	2.985.000
106 01 1 2 36	Tanda Daftar Perusahaan	35.200.000
106 01 1 2 36 01	Tanda Daftar Perusahaan	35.200.000
3	<b>HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	
106 01 1 3 04	Bagi hasil atas penyertaan modal/investasi	155.560.000
106 01 1 3 04 01	Penyertaan Modal Pada Koperasi	119.560.000
106 01 1 3 04 02	Bagi Hasil Atas Perkuatan Modal Pada Usaha Kecil	36.000.000
4	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	
106 01 1 4 08	Lain-lain Penerimaan	250.000
106 01 1 4 08 01	Legallsasi Badan Hukum Koperasi	250.000
	<b>BELANJA</b>	<b>2.409.256.000</b>
	<b>1 APARATUR DAERAH</b>	
206 01 1	<b>1 Belanja Administrasi Umum</b>	<b>1.785.382.000</b>
206 01 1 1	1 Belanja Pegawai/Personalia	1.622.017.000
206 01 1 2	1 Belanja Barang dan Jasa	89.360.000
206 01 1 3	1 Belanja Perjalanan Dinas	27.490.000
206 01 1 4	1 Belanja Pemeliharaan	56.525.000
206 01 2	1 Belanja Operasi dan Pemeliharaan	-
206 01 2	1 Belanja Pegawai/Personalia	-
206 01 3	1 Belanja Modal	308.800.000
	<b>2 PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>305.064.000</b>
206 01 2	<b>2 Belanja Administrasi Umum</b>	<b>251.964.000</b>
206 01 2 1	2 Belanja Pegawai/Personalia	59.899.000
206 01 2 2	2 Belanja Barang dan Jasa	167.597.000
206 01 2 3	2 Belanja Perjalanan Dinas	24.468.000
206 01 3	2 Belanja Modal	53.100.000
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.409.256.000</b>
	<b>SURPLUS / ( DEFISIT )</b>	<b>(2.190.281.000)</b>

Keterangan

Waktu Pembayaran

Termyn pembayaran

Triwulan I = Rp. 460,252,314,-

Triwulan II = Rp. 648,346,814,-

Triwulan III = Rp. 707,612,814,-

Triwulan IV = Rp. 593,035,058,-


Jumlah = Rp.2,409,256,000,-

Tanggal pembahasan : .....

Catatan hasil pembahasan

1  
2  
3

No. Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Karanganyar, Desember 2002  
Kepala Unit Kerja  
  
Drs. E. UMADI  
K A Pembina Utama Muda  
NIP. 160015680



RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR	S 3 A
UNIT KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI	TH. 2003

Ringkasan Anggaran Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	PENDAPATAN	
106 01 1 2	RESTRIBUSI DAERAH	63.165.000
106 01 1 3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	155.560.000
106 01 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	250.000
	<b>JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN</b>	<b>218.975.000</b>

	Keterangan	
Waktu Pembayaran		
Termyn pembayaran		
Triwulan I	= Rp. 47,381,250,-	
Triwulan II	= Rp. 47,881,250,-	
Triwulan III	= Rp. 47,881,250,-	
Triwulan IV	= Rp. 75,831,250,-	
Jumlah	= Rp. 218,975,000,-	

Karanganyar, Desember 2002

Kepala Unit Kerja

**Drs. D U M A D I**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 160015680

Tanggal pembahasan : .....

Catatan hasil pembahasan

- 1.
- 2.
- 3.

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda tangan
-----	------	-----	---------	--------------

- 1.
- 2.
- 3.

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda tangan
-----	------	-----	---------	--------------

- 1.
- 2.
- 3.

RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

S 3 A 1

UNIT KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI

TH. 2003

Kegiatan  
Restribusi Daerah

INDIKATOR	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA
MASUKAN	Dana pendapatan	Rp. 63,165,000,--
KELUARAN	Intensitas usaha meningkat	
HASIL	Legalitas usaha	
MANFAAT	Ketengangan dalam berusaha	
DAMPAK	Peningkatan PADS	

Anggaran Pendapatan Per Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	PENDAPATAN RESTRIBUSI DAERAH	63.165.000
1 06 01 1 2 33	Surat Ijin Usaha Perdagangan	
1 06 01 1 2 33 01	Surat Ijin Usaha Perdagangan	17.980.000
1 06 01 1 2 34	Tanda Ijin Usaha Industri	
1 06 01 1 2 34 01	Tanda Ijin Usaha Industri	7.000.000
1 06 01 1 2 35	Tanda Daftar Gudang	
1 06 01 1 2 35 01	Tanda Daftar Gudang	2.985.000
1 06 01 1 2 36	Tanda Daftar Perusahaan	
1 06 01 1 2 36 01	Tanda Daftar Perusahaan	35.200.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>63.165.000</b>

Keterangan

Waktu Pembayaran

Termyn pembayaran

Triwulan I	=	Rp. 15,541,250,-
Triwulan II	=	Rp. 16,041,250,-
Triwulan III	=	Rp. 16,041,250,-
Triwulan IV	=	Rp. 15,541,250,-
Jumlah	=	Rp. 63,165,000,-

Karanganyar, Desember 2002  
Kepala Unit Kerja

  
**Drs. D. SUMADI**  
Kepala Pembina Muda  
NIP. 160015680

Tanggal pembahasan : .....

Catatan hasil pembahasan

- 1.
- 2.
- 3.

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda tangan
-----	------	-----	---------	--------------

- 1.
- 2.
- 3.

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda tangan
-----	------	-----	---------	--------------

- 1.
- 2.
- 3.

RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR	S 3 A1
UNIT KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI	TH. 2003

Kegiatan

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

INDIKATOR	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA
MASUKAN	Dana pendapatan	Rp. 155,560,000,-
SELUARAN	Intensitas usaha meningkat	
HASIL	Legalitas usaha	
MANFAAT	Ketenangan dalam berusaha	
DAMPAK	Peningkatan PADS	

Anggaran Pendapatan Per Kegiatan

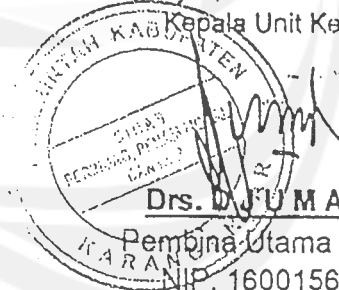
CODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	<b>PENDAPATAN</b>	
3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
106 01 1 3 04	Bagi hasil atas penyertaan modal/investasi	155.560.000
106 01 1 3 04 01	Penyertaan Modal Pada Koperasi	119.560.000
106 01 1 3 04 02	Bagi Hasil Atas Perkuatan Modal	36.000.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>155.560.000</b>

Keterangan

Waktu Pembayaran  
 Termyn pembayaran  
 kwulan I = Rp. 31,840,000,-  
 kwulan II = Rp. 31,840,000,-  
 kwulan III = Rp. 31,840,000,-  
 kwulan IV = Rp. 60,040,000,-  
 Jumlah = Rp. 155,560,000,-  
 tanggal pembahasan : .....  
 catatan hasil pembahasan

Karanganyar, Desember 2002

Kepala Unit Kerja



**Drs. D. JUMADI**

Pembina Utama Muda

NIP. 160015680

Nama	NIP	Jabatan	Tanda tangan
------	-----	---------	--------------

Nama	NIP	Jabatan	Tanda tangan
------	-----	---------	--------------


RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR		S 3 A 1
UNIT KERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI		TH. 2003
Kegiatan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		

INDIKATOR	TOLOK UKUR	TARGET KINERJA
MASUKAN	Dana pendapatan	Rp. 250.000,-
KELUARAN	Intensitas usaha meningkat	
HASIL	Legalitas usaha	
MANFAAT	Ketenangan dalam berusaha	
DAMPAK	Peningkatan PADS	

Anggaran Pendapatan Per Kegiatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
	PENDAPATAN	
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	
106 01 1 4 08	Lain-lain Penerimaan	250.000
106 01 1 4 08 01	Legalisasi Badan Hukum Koperasi	250.000
JUMLAH PENDAPATAN		250.000

Waktu Pembayaran	Keterangan
Termyn pembayaran :	
Bulan I	= Rp. -
Bulan II	= Rp. -
Bulan III	= Rp. -
Bulan IV	= Rp. 250.000,-
Jumlah	= Rp. 250.000,-

Karanganyar, Desember 2002  
Kepala Unit Kerja



**Drs. D. UMADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 160015680

Tanggal pembahasan : .....  
Catatan hasil pembahasan

Nama	NIP	Jabatan	Tanda tangan
------	-----	---------	--------------

Nama	NIP	Jabatan	Tanda tangan
------	-----	---------	--------------

RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR		S 3 B1
UNIT KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI		TAHUN 2003
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
	<b>BELANJA</b>	Rp 613.864.000
	1 APARATUR DAERAH	
2 0601 3	1 BELANJA MODAL	Rp 308.800.000
2 0601 3 6	1 Belanja Modal Gedung Kantor	Rp -
2 0601 3 6 01	1 Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	Rp -
2 0601 3 6 01 01	1 Biaya Modal Gedung Kantor Diperindag	Rp 308.800.000
	2 PELAYANAN PUBLIK	
	2 BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	Rp 305.064.000
2 0601 2 1	2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	Rp 59.899.000
2 0601 2 1 01	2 Honorarium	Rp 59.899.000
2 0601 2 1 01 01	2 Honorarium Tim/Panitia	Rp 27.684.000
2 0601 2 1 01 03	2 Honor/Upah Harian	Rp 32.215.000
2 0601 2 2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 167.597.000
2 0601 2 2 01	2 Biaya Bahan/Material	Rp 21.283.000
2 0601 2 2 01 04	2 Biaya Bahan Percontohan/Serahan	Rp 10.509.000
2 0601 2 2 01 05	2 Biaya Alat Tulis	Rp 10.774.000
2 0601 2 2 02	2 Biaya Jasa Pihak Ketiga	Rp 14.310.000
2 0601 2 2 02 02	2 Biaya Transportasi dan Akomodasi	Rp 5.600.000
2 0601 2 2 02 03	2 Biaya Dokumentasi	Rp 3.847.000
2 0601 2 2 02 04	2 Biaya Dekorasi	Rp 4.863.000
2 0601 2 2 03	2 Biaya Cetak dan Penggandaan	Rp 18.395.000
2 0601 2 2 03 01	2 Biaya Cetak	Rp 18.395.000
2 0601 2 2 04	2 Biaya Sewa	Rp 74.129.000
2 0601 2 2 04 01	2 Biaya Sewa Tempat	Rp 62.855.000
2 0601 2 2 04 02	2 Biaya Sewa Kendaraan/Alat Angkut	Rp 10.574.000
2 0601 2 2 04 03	2 Biaya Sewa Perlengkapan	Rp 700.000
2 0601 2 2 05	2 Biaya Makanan dan Minuman	Rp 39.480.000
2 0601 2 2 05 01	2 Biaya Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.349.000
2 0601 2 2 05 02	2 Biaya Makanan dan Minuman Pembinaan/Diklat/ Kegiatan	Rp 38.131.000
2 0601 2 3	2 BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp 24.468.000
2 0601 2 3 01	2 Biaya Perjalanan Dinas	
2 0601 2 3 01 01	2 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 16.889.000
2 0601 2 3 01 02	2 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 7.579.000
2 0601 3	2 BELANJA MODAL	Rp 53.100.000
2 0601 3 10	2 Belanja Modal Alat Bengkel	Rp 53.100.000
2 0601 3 10 01	2 Belanja Modal Alat Bermesin	Rp 53.100.000
2 0601 3 10 01 01	2 Belanja Modal Mesin dan Perlengkapan - Mesin Jahit Juki = Rp. 30.000.000,-	Rp 53.100.000

Keterangan

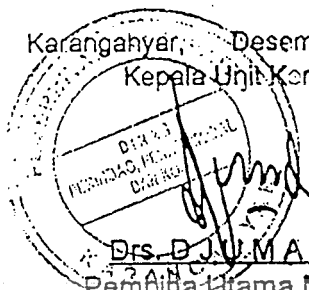
Waktu Pelaksanaan :

Penyediaan Dana :

Triwulan I = Rp. -  
Triwulan II = Rp. 183,094,500,-  
Triwulan III = Rp. 247,369,500,-  
Triwulan IV = Rp. 183,400,000,-  
Jumlah = Rp. 613,864,000,-

Karangahyer, Desember 2002

Kepala Unit Kerja



Drs. D. JUMADI

Pembina Utama Muda

NIP. 160015680

Tanggal pembahasan

Catatan Hasil pembahasan

- 1.
- 2.
- 3.

No.	N a m a	NIP	Jabatan	Tanda tangan
-----	---------	-----	---------	--------------

- 1.
- 2.
- 3.

No.	N a m a	NIP	Jabatan	Tanda tangan
-----	---------	-----	---------	--------------

- 1.
- 2.
- 3.

RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR	S 3 B2
UNIT KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI	TAHUN 2003

Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
	<b>BELANJA</b>	
	1 APARATUR DAERAH	
	1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM	Rp 1.795.392.000
2 0601 1 1	1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	Rp 1.622.017.000
2 0601 1 2	1 BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 89.360.000
2 0601 1 3	1 BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp 27.490.000
2 0601 1 4	1 BELANJA PEMELIHARAAN	Rp 56.525.000

Keterangan

Waktu Pelaksanaan :

Penyediaan Dana :

Triwulan I = Rp. 460,252,314,-

Triwulan II = Rp. 465,252,314,-

Triwulan III = Rp. 460,252,314,-

Triwulan IV = Rp. 409,635,058,-

Jumlah = Rp. 1,795,392,000,-

Karanganyar, Desember 2002

Kepala Unit Kerja

Drs. DJUMADI

Pembina Utama Muda

NIP. 160015680

Tanggal pembahasan

Catatan Hasil pembahasan

- 1.
- 2.
- 3.

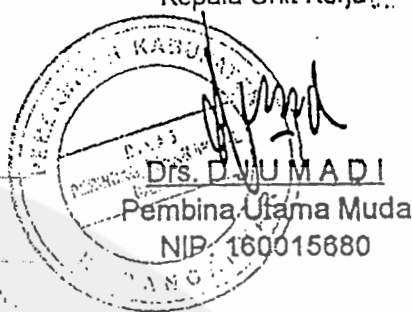
No.	N a m a	NIP	Jabatan	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				

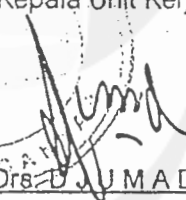
No.	N a m a	NIP	Jabatan	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				

RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR		S 3 B2.1	
UNIT KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI		TAHUN 2003	
Kegiatan			
Anggaran Belanja Tidak Langsung			
KODE REKENING	URAIAN		
	<b>BELANJA</b>		
	1 APARATUR DAERAH		
	1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM	Rp	1.795.392.000
2 0601 1 1	1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	Rp	1.622.017.000
2 0601 1 1 03	1 Gaji dan Tunjangan Pegawai	Rp	1.613.217.000
2 0601 1 1 03 01	1 Gaji Pokok	Rp	1.060.690.000
2 0601 1 1 03 02	1 Tunjangan Keluarga	Rp	125.209.000
2 0601 1 1 03 03	1 Tunjangan Jabatan	Rp	94.320.000
2 0601 1 1 03 04	1 Tunjangan Fungsional	Rp	4.260.000
2 0601 1 1 03 05	1 Tunjangan Kesejahteraan	Rp	118.590.000
2 0601 1 1 03 06	1 Tunjangan Beras	Rp	101.162.000
2 0601 1 1 03 07	1 Tunjangan PPH	Rp	32.121.000
2 0601 1 1 03 08	1 Pembulatan Gaji	Rp	45.000
2 0601 1 1 03 09	1 Accres	Rp	76.820.000
2 0601 1 1 05	1 Biaya Pengembangan SDM	Rp	4.000.000
2 0601 1 1 05 01	1 Biaya Beasiswa , Bantuan Tugas Belajar Ikatanaan Dinas	Rp	-
2 0601 1 1 05 02	1 Biaya Bantuan Pelatihan dan Khusus Ketrampilan	Rp	4.000.000
2 0601 1 1 05 03	1 Biaya Bantuan Penelitian dan Studi ( Penulisan Karya Ilmiah )	Rp	-
2 0601 1 1 05 04	1 Biaya Bantuan Penyaringan Calon Siswa STPDN, UP, Program Magister ( S2 )	Rp	-
2 0601 1 1 06	1 Honorarium Satuan Pemegang Kas	Rp	4.800.000
	- Pemegang Kas	Rp	1.200.000
	- Pembantu Pemegang Kas ( 5 orang )	Rp	3.600.000
2 0601 1 2	1 BELANJA BARANG DAN JASA		89.360.000
2 0601 1 2 01	1 Biaya Bahan Habis Pakai Kantor	Rp	19.400.000
2 0601 1 2 01 01	1 Biaya Alat Listrik dan Elektronik ( lampu Pijar,battery kering )	Rp	2.300.000
2 0601 1 2 01 02	1 Biaya Alat Tulis	Rp	13.300.000
2 0601 1 2 01 03	1 Biaya Perangko ,Materai dan Benda Pos lainnya.	Rp	1.800.000
2 0601 1 2 01 04	1 Biaya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Rp	2.000.000
2 0601 1 2 01 05	1 Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran.	Rp	-
2 0601 1 2 02	1 Biaya Jasa Kantor	Rp	49.800.000
2 0601 1 2 02 01	1 Biaya Listrik	Rp	5.400.000
2 0601 1 2 02 02	1 Biaya Telepon	Rp	18.000.000
2 0601 1 2 02 03	1 Biaya Air	Rp	1.800.000
2 0601 1 2 02 04	1 Biaya Surat Kabar/Majalah	Rp	2.400.000
2 0601 1 2 02 05	1 Biaya Kawat/Faksimili	Rp	2.400.000
2 0601 1 2 02 06	1 Biaya Paket/Pengiriman	Rp	1.800.000
2 0601 1 2 02 07	1 Biaya Jasa Pegawai Non PNS	Rp	18.000.000



2	06011	2	03	1	Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor	Rp	16.800.000
2	06011	2	03 01	1	Biaya Cetak	Rp	12.000.000
2	06011	2	03 02	1	Biaya Fotocopy	Rp	4.800.000
2	06011	2	05	1	Biaya makanan dan minuman		
2	06011	2	05 01	1	Biaya makanan dan minuman harian	Rp	3.360.000
2	06011	2	05 02	1	Biaya makanan dan minuman rapat	Rp	3.060.000
2	06011	2	05 03	1	Biaya makanan dan minuman tamu	Rp	3.000.000
2	06011	3		1	<b>BELANJA BIAYA PERJALANAN DINAS</b>	Rp	27.490.000
2	06011	3	01	1	Biaya Perjalanan Dinas	Rp	27.490.000
2	06011	3	01 01	1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	6.500.000
2	06011	3	01 02	1	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	20.990.000
2	06011	4		1	<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>	Rp	56.525.000
2	06011	4	01	1	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	Rp	12.525.000
2	06011	4	01 01	1	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	8.125.000
					- Biaya pengecatan dan pengapuran	Rp	1.875.000
					- Biaya perbaikan pintu dan jendela	Rp	750.000
					- Biaya perbaikan atap dan lantai	Rp	1.250.000
					- Biaya perbaikan sumur, wc dan leideng	Rp	750.000
					- Biaya perbaikan pagar dan halaman	Rp	750.000
					- Biaya pemeliharaan taman dan tempat parkir	Rp	750.000
					- Biaya pemeliharaan AC, sound system dan lain-lain	Rp	750.000
					- Biaya pemeliharaan kebersihan	Rp	1.250.000
2	06011	4	01 02	1	Biaya Pemeliharaan Gedung Tempat Tinggal	Rp	4.400.000
					- Biaya perbaikan pintu dan jendela	Rp	1.000.000
					- Biaya perbaikan atap dan lantai	Rp	500.000
					- Biaya langganan listrik	Rp	2.400.000
					- Biaya perbaikan listrik, air dan gas	Rp	500.000
2	06011	4	02	1	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	Rp	28.000.000
2	06011	4	02 01	1	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp	28.000.000
					- Biaya pajak dan pengujian kendaraan	Rp	1.000.000
					- Biaya reparasi dan penggantian suku cadang	Rp	3.915.000
					- Biaya service	Rp	1.500.000
					- Biaya minyak pelumas dan BBM	Rp	14.000.000
					- Biaya pembelian accu dan ban mobil	Rp	3.000.000
					- Biaya eksploitasi kendaraan roda dua	Rp	4.585.000
2	06011	4	02 02	1	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp	-
2	06011	4	03	1	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	15.000.000
2	06011	4	03 01	1	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor	Rp	4.500.000
2	06011	4	03 02	1	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga	Rp	3.000.000
2	06011	4	03 03	1	Biaya Pemeliharaan Komputer	Rp	4.500.000
2	06011	4	03 04	1	Biaya Pemeliharaan Meja dan Kursi.	Rp	3.000.000
2	06011	4	05	1	Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan	Rp	1.000.000
2	06011	4	05 01	1	Biaya Pemeliharaan Buku	Rp	1.000.000
2	06011	4	05 02	1	Biaya Pemeliharaan Terbitan Berkala	Rp	-

Keterangan		Karanganyar, Desember 2002		
Waktu Pelaksanaan :		Kepala Unit Kerja ...		
Penyediaan Dana :				
Triwulan I	= Rp. 460,252,314,-			
Triwulan II	= Rp. 465,252,314,-			
Triwulan III	= Rp. 460,252,314,-			
Triwulan IV	= Rp. 409,635,058,-			
Jumlah	= Rp. 1,795,392,000,-	Drs. D. JUMADI Pembina Utama Muda NIP. 160015680		
Tanggal pembahasan				
Catatan Hasil pembahasan				
1.				
2.				
3.				
TIM ANGGARAN EKSEKUTIF				
No.	N a m a	NIP	Jabatan	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
No.	N a m a	NIP	Jabatan	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				

<b>RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</b>		<b>S 3 B1.1</b>		
<b>UNIT KERJA</b>		<b>TAHUN 2003</b>		
<b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PENANAMAN MODAL DAN KOPERASI</b>				
<b>KEGIATAN</b>				
<b>PEMBANGUNAN DAN REHAB GEDUNG KANTOR DINAS PERINDAG, PENDAL DAN KOP</b>				
<b>INDIKATOR</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>		
<b>MASUKAN</b>	Jumlah dana yang tersedia	Rp. 308.800.000,-		
<b>KELUARAN</b>	Terbangunnya gedung baru dan rehab gedung lama	Pembangunan & rehab gedung		
<b>MASIL</b>	Menciptakan suasana kerja yang representatif	Meningkatnya kinerja		
<b>MANFAAT</b>	Efisiensi dan efektifitas kerja dan pelayanan	Meningkatkan pendapatan		
<b>DAMPAK</b>	Pelayanan prima dapat tercapai			
<b>ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN</b>				
<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>		
2 06 01	1 APARATUR DAERAH			
2 06 01 3	1 BELANJA MODAL			
2 06 01 3 6	1 Belanja Modal Bangunan Gedung	308.800.000		
2 06 01 3 6 01	1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	308.800.000		
2 06 01 3 6 01 01	1 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Diperindag	308.800.000		
	Jumlah Belanja Modal	308.800.000		
	Jumlah Total	308.800.000		
Keterangan				
Waktu Pembayaran :		Karanganyar, Desember 2002		
Termyn pembayaran :		Kepala Unit Kerja		
I = Rp. -		 Drs. D. JUMADI NIP. 160015680		
II = Rp. 38.800.000,-				
III = Rp. 123.520.000,-				
IV = Rp. 154.400.000,-				
Jumlah	= Rp. 308.800.000,-			
Tanggal pembahasan : .....				
Catatan hasil pembahasan				
1.				
2.				
3.				
No.	N a m a	NIP	Jabatan	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
No.	N a m a	NIP	Jabatan	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				

- 2 -

**Proposal Usulan Kegiatan  
Rehab dan Pembangunan Gedung  
TAHUN ANGGARAN 2003  
DINAS PERINDAG, PENDAL DAN KOP KAB. KARANGANYAR**

- AR BELAKANG** : Bahwa kondisi gedung lama (ex. Depdag )-idealnya hanya mampu menampung  $\pm$  21 PNS, sedangkan rencananya  $\pm$  55 PNS sehingga perlu rehab dan perluasan gedung dan nantinya dengan sentralisasi kegiatan dapat menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif dan **efisiensi**.
- SAR HUKUM** : SK Pj. Bupati Karanganyar No. 73 / 2003 Tgl.31 Maret 2003
- UAN** : Efisiensi, efektifitas pelayanan dan suasana kerja yang representatif
- ASI** : Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar
- RGET/ HASIL AKHIR** : Rehab dan Pembangunan gedung Kantor
- LUME** : -
- SKRIPSI PENGGUNAAN DANA** :
- Sumber Dana : APBD TK. II ( Rp. 308.800.000 )
- Perincian Dana :
- Persiapan : Rp. 6.176.000,-
- Pelaksanaan : Rp. 293.360.000,-
- Administrasi : Rp. 9.264.5000,-
- LAKSANA KEGIATAN** : Drs. DJUMADI  
(Kepala Dinas Perindag Pendalkop)
- ambar Kontruksi  
Untuk Kegiatan Fisik )** : Menyusul( Dalam Proses )
- eterangan** : Dalam rencana salah satu Kantor Diperindag, Pendal dan Kop (Subdin Pendal/eks Kawedanan Kra) digunakan Dipenda Kra.

Karanganyar , 2 April 2003

Kepala Dinas Perindag, Pendal dan Koperasi  
Kab. Karanganyar

RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR		S.3. B1.1	
Unit Kerja DINAS PERINDAG, PENDAL, DAN KOPERASI (Subdin Perindustrian)		TAHUN 2003	
MBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERANAN WANITA DI DESA KEBAK DAN DESA LOSARI, KECAMATAN KEBAKKRAMAT			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Masukan	Tersedianya Dana		
Keluaran	30 wanita perajin konveksi yang terlatih dan terampil		
Hasil	30 IK konveksi dengan sarana produksi yang kuat		
Manfaat	- Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pakaian jadi. - Membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha.		
Dampak	- Memperluas pangsa pasar produk pakaian jadi. - Meningkatkan kesejahteraan perajin lewat peningkatan pendapatan. - Mengurangi pengangguran.		
Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan			
de Rekening	Uraian	Jumlah	
6.01.2	2 Pelayanan Publik		
6.01.2.1	2 Belanja Pegawai/Personalia		
6.01.2.01.01	2 Honorarium Tim Panitia	Rp 2.548.000,-	
6.01.2.01.03	2 Honor/Upah Harian	Rp 1.200.000,-	
	<b>Jumlah Belanja Pegawai/Personil</b>		<b>Rp 3.748.000</b>
6.01.2.2	2 <b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
6.01.2.2.01	2 Biaya Bahan/Material	Rp 688.000,-	
6.01.2.2.01.05	2 Biaya Alat Tulis	Rp 187.000,-	
6.01.2.2.02	2 Biaya Jasa Pihak Ketiga		
6.01.2.2.02.03	2 Biaya Dokumentasi	Rp 300.000,-	
6.01.2.2.02.04	2 Biaya Dekorasi	Rp 300.000,-	
6.01.2.2.03	2 Biaya Cetak & Penggandaan	Rp 320.000,-	
6.01.2.2.04.01	2 Biaya Sewa Ruang, Sound System, Meja Kursi	Rp 800.000,-	
6.01.2.2.05.03	2 Biaya Makan dan Minum	Rp 1.850.000,-	
	<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>Rp 4.445.00</b>
6.01.2.3	2 Belanja Perjalanan Dinas	Rp -	
6.01.2.3.01.01	2 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp 1.440.000,-	
	<b>Jumlah Belanja Perjalanan Dinas</b>		<b>Rp 1.440.00</b>
<b>Jumlah Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>			<b>Rp 9.633.00</b>


3	2	2. Belanja Modal		
3 10 0101 2		Belanja Modal Mesin dan Perlengkapan	Rp	30.000.000,-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>				<b>Rp 30.000.000,-</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 39.632.000,-</b>

ngan

Pelaksanaan  
Pembayaran:

- I. Rp .....
- II. Rp .....
- III. Rp 39.633.000,-.....
- IV. RP .....
- Jumlah Rp .....

Kepala Unit Kerja  
Karanganyar, 7 April 2003



**Drs. DJUMADI**  
NIP. 160015680

al Pembahasan  
n Hasil Pembahasan:

**Tim Anggaran Eksekutif**

Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
------	-----	---------	--------------

**Unit Kerja**

Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
------	-----	---------	--------------

5

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 954 / 5 / 2003  
TANGGAL : 2 - 1 - 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN ANGGARAN 2003

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretarias Daerah	Ketua merangkap Anggota	
2.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar	Wakil Ketua I merangkap Anggota.	
3.	Assisten Administrasi Setda Kab. Karanganyar	Wakil Ketua merangkap Anggota.	
4.	Assisten Tata Praja Setda Kabupaten Karanganyar.	Wakil Ketua merangkap Anggota.	
5.	Assisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Karanganyar.	Wakil Ketua merangkap Anggota.	
6.	Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Karanganyar	Sekretaris I merangkap Anggota.	
7.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Karanganyar	Sekretaria II merangkap Anggota.	
8.	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karanganyar	A n g g o t a .	
9.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Karanganyar.	A n g g o t a .	

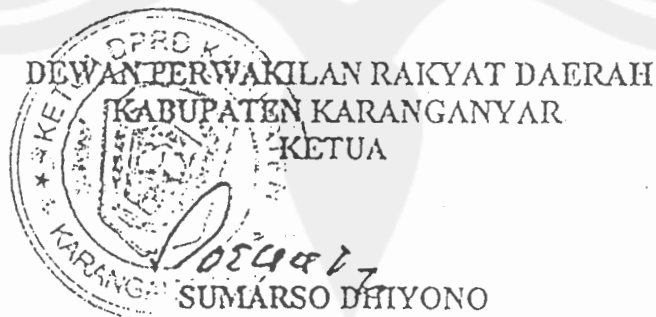
PENJABAT BUPATI KARANGANYAR



Lampiran: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar  
Tanggal : 6 Agustus 2003  
Nomor : 176.4/ 3/ Tahun 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA RUMAH TANGGA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MD SOETARNO	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	FPG
	BAGUS SELO, B.BA.	WK KETUA MERANGKAP ANGGOTA	FPDIP
3.	Dra. ENDANG SRI HANDAYANI	SEKRET MERANGKAP ANGGOTA	FPEMBAHARUAN
4.	Drs. DJOKO SIWIJONO, M.B.A.	ANGGOTA	FPDIP
5.	SURONO	ANGGOTA	FPDIP
6.	ARYADI HN, S.H.	ANGGOTA	FPDIP
7.	LOSO, Bt,Hk.	ANGGOTA	FPG
8.	MARDO	ANGGOTA	FTNI/POLRI
9.	Drs. AGUS JAWARI	ANGGOTA	FPEMBAHARUAN
10.	Drs. DJOKO DARMADI	ANGGOTA	FPEMBAHARUAN



WAKIL KETUA

SUPARNO HS

WAKIL KETUA

SUPARMAN ENDRO TANOYO

WAKIL KETUA

SOEPARNO



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN ANGGARAN 2003**

EMERINTAHAN : 10 - BIDANG KESEHATAN  
ANISASI : 01 - DINAS KESEHATAN

REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>2</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1 2 40	Retribusi Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Sarana Umum	5.000.000,00	PERDA Kab. Karanganyar No. 13Th. 2002 (LD No. 28 Seri C 10)
1 2 41	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Lingkungan Laboratorium DKK	5.000.000,00	PERDA Kab. Karanganyar No. 12 Th. 2002 (LD No. 27 Seri C 9)
<b>4</b>	<b>LAIN-LAIN PAD YAN SAH</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1 4 08	Lain-lain Penerimaan	20.000.000,00	
	<b>BELANJA</b>	<b>4.315.182.000,00</b>	
<b>1</b>	<b>APARATUR DAERAH</b>	<b>1.851.327.000,00</b>	
<b>1</b>	<b>BELANJA ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>1.851.327.000,00</b>	
<b>1 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA</b>	<b>1.742.827.000,00</b>	
1 1 03	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.737.747.000,00	
1 1 04	Biaya Perawatan dan Pengobatan	-	
1 1 05	Biaya pengembangan Sumber Daya Manusia	1.000.000,00	
1 1 08	Honorarium	4.080.000,00	
<b>1 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.000.000,00</b>	
1 2 01	Biaya Bahan Habis Pakai Kantor	18.600.000,00	
1 2 02	Biaya Jasa Kantor	43.300.000,00	
1 2 03	Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor	2.600.000,00	
1 2 04	Biaya Sewa Kantor	-	
1 2 05	Biaya Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
<b>1 3</b>	<b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>	<b>7.000.000,00</b>	
1 3 01	Biaya Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
<b>1 4</b>	<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>	<b>34.500.000,00</b>	
1 4 01	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	14.000.000,00	
1 4 02	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	14.000.000,00	
1 4 03	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	6.500.000,00	

1	2	3	4
	2 PELAYANAN PUBLIK	2.483.855.000,00	
2	2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1.772.855.000,00	
2 1	2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	52.377.000,00	
2 1 01	2 Honorrarium	38.830.000,00	
2 1 04	2 Biaya Penunjang	15.397.000,00	
2 2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	1.847.252.000,00	
2 2 01	2 Biaya Bahan/Material	1.541.774.000,00	
2 2 02	2 Biaya Jasa Pihak Ketiga	5.148.000,00	
2 2 03	2 Biaya Cetak dan Penggandaan	18.940.000,00	
2 2 05	2 Biaya Makanan dan Minuman	81.392.000,00	
2 3	2 BELANJA PERJALANAN DINAS	72.242.000,00	
2 3 01	2 Biaya Perjalanan Dinas	72.242.000,00	
2 4	2 BELANJA PEMELIHARAAN	984.000,00	
2 4 13	2 Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	984.000,00	
3	2 BELANJA MODAL	582.000.000,00	
3 6 01 01	2 Belanja Modal Bangunan Gedung Puskesmas	280.000.000,00	
3 14 02	2 Belanja Modal Bangunan Alat-alat Kesehatan	292.000.000,00	
3 15 01	2 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	10.000.000,00	
4	2 BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	109.000.000,00	
4 7	2 Belanja Bantuan Kepada Masyarakat	109.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	30.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.315.182.000,00	
	SURPLUS (DIFISIT)	(4.285.182.000,00)	

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN ANGGARAN 2003**

PEMERINTAHAN : 11 - BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
ORGANISASI : 01 - DINAS PENDIDIKAN

REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	<b>BELANJA</b>	<b>157.288.816.850,00</b>	
	1 APARATUR DAERAH	5.694.887.750,00	
1	1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM	5.372.387.750,00	
1 1	1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	1.694.846.000,00	
1 1 03	1 Gaji dan Tunjangan Pegawai	1.649.638.000,00	
1 1 04	1 Biaya Perawatan dan Pengobatan	-	
1 1 05	1 Biaya pengembangan Sumber Daya Manusia	38.250.000,00	
1 1 6	1 Honorarium	6.960.000,00	
1 2	1 BELANJA BARANG DAN JASA	2.515.891.000,00	
1 2 01	1 Biaya Bahan Pakai Habis Kantor	1.548.510.000,00	
1 2 02	1 Biaya Jasa Kantor	685.453.000,00	
1 2 03	1 Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor	143.248.000,00	
1 2 04	1 Biaya Sewa Kantor	-	
1 2 05	1 Biaya Makanan dan Minuman	138.682.000,00	
1 3	1 BELANJA PERJALANAN DINAS	144.920.000,00	
1 3 01	1 Biaya Perjalanan Dinas	144.920.000,00	
1 4	1 BELANJA PEMELIHARAAN	1.016.730.750,00	
1 4 01	1 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	620.765.750,00	
1 4 02	1 Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	19.600.000,00	
1 4 03	1 Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga.	292.255.000,00	
1 4 05	1 Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan	84.110.000,00	
	1 BELANJA MODAL	322.500.000,00	
2	1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat kerja	182.000.000,00	
3	1 Belanja Modal Alat-alat Kantor	32.500.000,00	
4	1 Belanja Modal Komputer	108.000.000,00	
	<b>2 PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>151.593.929.100,00</b>	
	<b>2 BELANJA ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>140.936.354.000,00</b>	
1	2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	136.909.844.000,00	
1 03	2 Gaji dan Tunjangan Pegawai	136.909.844.000,00	

	2	3	4
2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	1.440.000.000,00	
2 01	2 Biaya Bahan Labis Pakai Kantor	-	
2 02	2 Biaya Jasa Kantor	1.440.000.000,00	
3	2 BELANJA PERJALANAN DINAS	55.760.000,00	
3 01	2 Blaya Perjalanan Dinas	55.760.000,00	
4	2 BELANJA PEMELIHARAAN	2.530.750.000,00	
4 01	2 Blaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	2.530.750.000,00	
	2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	7.487.092.000,00	
1	2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	3.131.965.800,00	
1 01	2 Honorrarium	635.017.800,00	
1 03	2 Insentif	2.496.948.000,00	
1 04	2 Biaya Penunjang		
2	2 BELANJA BARANG DAN JASA	2.746.415.700,00	
2 01	2 Biaya Bahan/Material	977.614.320,00	
2 02	2 Biaya Jasa Pihak Ketiga	206.142.500,00	
2 03	2 Biaya Cetak dan Penggandaan	687.534.380,00	
2 04	2 Biaya Sewa	174.510.000,00	
2 05	2 Biaya Makanan dan Minuman	625.109.500,00	
2 06	2 Biaya Pakaian Kerja	75.505.000,00	
3	2 BELANJA PERJALANAN DINAS	143.710.500,00	
3 01	2 Blaya Perjalanan Dinas	143.710.500,00	
4	2 BELANJA PEMELIHARAAN	1.465.000.000,00	
4 05	2 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	1.465.000.000,00	
	2 BELANJA MODAL	3.170.483.100,00	
6 01	2 Belanja Modal Bangunan Gedung	1.987.444.000,00	
10 01	2 Belanja Modal Alat-alat Bengkel bermesin	575.240.000,00	
12 04	2 Belanja Modal Meja dan Kursi	180.000.000,00	
15 02	2 Belanja Modal Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah	133.465.000,00	
16 01	2 Belanja Modal Buku	256.134.100,00	
17 01	2 Belanja Modal Barang bercorak kebudayaan	38.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	-	
	JUMLAH BELANJA	156.565.127.850,00	
	SURPLUS (DIFISIT)	(156.565.127.850,00)	

PENJABARAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2003

Lampiran : Surat Keputusan Bupati  
Nomor :  
Tanggal :

BIDANG PEMERINTAHAN : 01 - BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN  
UNIT ORGANISASI : 01 - DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	DASAR HUKUM/KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN	-	
	BELANJA	6.514.435.000,00	
	1 APARATUR DAERAH	6.514.435.000,00	
01 01 1	1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM	6.514.435.000,00	
01 01 1 1	1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	6.514.435.000,00	
01 01 1 1 01	1 Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.861.418.000,00	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
01 01 1 1 01 01	1 Uang Representatif	551.880.000,00	Uang Representatif bagi : - Ketua DPRD : 1 (Org) x 12 (bln) x Rp 1.260.000,00 = Rp 15.120.000,00 - Wakil Ketua DPRD : 3 (Org) x 12 (bln) x Rp 1.134.000,00 = Rp 40.824.000,00 - Anggota DPRD : 41 (Org) x 12 (bln) x Rp 1.008.000,00 = Rp 495.936.000,00
01 01 1 1 01 02	1 Tunjangan Keluarga dan Beras	120.449.000,00	
01 01 1 1 01 03	1 Uang Paket	137.970.000,00	Uang Jabatan bagi Ketua dan Anggota DPRD : - Ketua DPRD : 1 (Org) x 12 (bln) x Rp 315.000,00 = Rp 3.780.000,00

1	2	3	4
01 01 1 1 01 04 1	Tunjangan Jabatan	27.972.000,00	- Wakil Ketua DPRD : 3 (Org) x 12 (bln) x Rp 283.500,00 = Rp 10.206.000,00 - Anggota DPRD : 41 (Org) x 12 (bln) x Rp 252.000,00 = Rp 123.984.000,00
01 01 1 1 01 05 1	Tunjangan Komisi	38.556.000,00	Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD : - Ketua DPRD : 1 (Org) x 12 (bln) x Rp 630.000,00 = Rp 7.560.000,00 - Wakil Ketua DPRD : 3 (Org) x 12 (bln) x Rp 567.000,00 = Rp 20.412.000,00  Ketua Komisi DPRD : - 5 (Org) x 12 (bln) x Rp 126.000,00 = Rp 7.560.000,00 Wakil Ketua DPRD : - 5 (Org) x 12 (bln) x Rp 94.500,00 = Rp 5.670.000,00 Sekretaris Komisi DPRD : - 5 (Org) x 12 (bln) x Rp 94.500,00 = Rp 5.670.000,00 Anggota Komisi DPRD : - 26 (Org) x 12 (bln) x Rp 63.000,00 = Rp 19.656.000,00
01 01 1 1 01 06 1	Tunjangan Khusus/Tunjangan PPh. 21	100.000.000,00	
01 01 1 1 01 07 1	Tunjangan Panitia	178.728.000,00	Panitia Anggaran : = Rp 10.962.000,00 - Ketua : = Rp 1.134.000,00 1 (Org) x 12 (bln) x Rp 94.500,00 = Rp 1.134.000,00 - Wakil Ketua : = Rp 2.268.000,00 3 (Org) x 12 (bln) x Rp 63.000,00 = Rp 2.268.000,00 - Sekretaris : = Rp 756.000,00 1 (Org) x 12 (bln) x Rp 63.000,00 = Rp 756.000,00 - Anggota : = Rp 6.804.000,00 18 (Org) x 12 (bln) x Rp 31.500,00 = Rp 6.804.000,00  Panitia Musyawarah = Rp 12.474.000,00 - Ketua : = Rp 1.134.000,00 1 (Org) x 12 (bln) x Rp 94.500,00 = Rp 1.134.000,00

1	2	3	4
			- Wakil Ketua : 3 (Org) x 12 (bln) x Rp 63.000,00 = Rp 2.268.000,00
			- Sekretaris : 1 (org) x 12 (bln) x Rp 63.000,00 = Rp 756.000,00
			- Anggota : 22 (Org) x 12 (bln) x Rp 31.500,00 = Rp 8.316.000,00
			Panitia Khusus = Rp 150.000.000,00
			- 15 kegiatan x Rp 10.000.000,00 = Rp 150.000.000,00
			Panitia Rumah Tangga = Rp 5.292.000,00
			- Ketua : 1 (Org) x 12 (bln) x Rp 94.500,00 = Rp 1.134.000,00
			- Wakil Ketua : 1 (Org) x 12 (bln) x Rp 63.000,00 = Rp 756.000,00
			- Sekretaris : 1 (org) x 12 (bln) x Rp 63.000,00 = Rp 756.000,00
			- Anggota : 7 (Org) x 12 (bln) x Rp 31.500,00 = Rp 2.646.000,00
1 01 1 1 01 08 1	Tunjangan Kesehatan	15.750.000,00	a. Biaya Chek Up Pimpinan dan Anggota DPRD : 45 (Org) x Rp 350.000,00 = Rp 15.750.000,00
1 01 1 1 01 09 1	Uang Duka	10.000.000,00	
1 01 1 1 01 10 1	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	249.928.000,00	Tunjangan Perbaikan Penghasilan : - Ketua : 1 (org) x 12 (bln) x Rp 504.240,00 = Rp 6.050.880,00 - Wakil Ketua : 3 (org) x 12 (bln) x Rp 482.300,00 = Rp 17.362.800,00 - Anggota : 41 (org) x 12 (bln) x Rp 460.350,00 = Rp 226.492.200,00 - Pembulatan = Rp 22.120,00

1	2	3	4
01 01 1 1 01 11	1 Biaya Pakaian Dinas	56.625.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD : - PSH : 2 stel x 45 x Rp 412.500,00 = Rp 37.125.000,00 - PSR : 1 stel x 45 x Rp 450.000,00 = Rp 20.250.000,00 - Bantuan Ongkos Jahit 45 (Org) x Rp 500.000,00 = Rp 22.500.000,00 Anggota DPRD Antar Waktu : - PSL : 1 stel x 10 x Rp 700.000,00 = Rp 7.000.000,00 - Bantuan ongkos jahit : 10 (Org) x Rp 300.000,00 = Rp 3.000.000,00 - Pengadaan Lencana Lambang Daerah : 10 (Org) x Rp 675.000,00 = Rp 6.750.000,00
01 01 1 1 01 12	1 Biaya Perjalanan dinas dan pindah	333.560.000,00	a. Pimpinan dan anggota DPRD = Rp 208.560.000,00 1. Perjalanan Dinas Tetap Pimp. DPRD = Rp 12.000.000,00 4 org x 12 bln x Rp 250.000,00 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah = Rp 110.000.000,00 3. Perjalanan Dinas Luar Daerah = Rp 86.560.000,00 b. Biaya kunjungan kerja ke luar daerah = Rp 125.000.000,00
01 01 1 1 02	1 Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	400.000.000,00	
01 01 1 1 02 01	1 Dana Penunjang kegiatan DPRD	60.000.000,00	
01 01 1 1 02 02	1 Taktis Pimpinan DPRD	171.250.000,00	
01 01 1 1 02 03	1 Bantuan kegiatan fraksi	168.750.000,00	
01 01 1 1 03	1 Biaya Penunjang Pembahasan/Kepanitiaan	415.000.000,00	
01 01 1 1 03 01	1 Pembahasan APBD	172.500.000,00	
01 01 1 1 03 02	1 Pembahasan Perubahan APBD	12.500.000,00	
01 01 1 1 03 03	1 Pembahasan Perhitungan APBD	12.500.000,00	
01 01 1 1 03 04	1 Pembahasan LPJ Tahun 2002	67.500.000,00	
01 01 1 1 03 05	1 Pembahasan Renstra	75.000.000,00	
01 01 1 1 03 06	1 Pembahasan Properda	75.000.000,00	
01 01 1 1 04	1 Biaya Penunjang Bantuan Kesejahteraan	935.417.000,00	
01 01 1 1 04 01	1 Bantuan kesejahteraan anggota	360.468.000,00	- Bantuan kesejahteraan anggota 41 (org) x 12 (bln) x Rp 504.000,00 = Rp 247.968.000,00 - Bantuan kegiatan anggota Fraksi = Rp 112.500.000,00
01 01 1 1 04 02	1 Bantuan rumah tangga Pimpinan dan anggota	270.000.000,00	- Bantuan rumah tangga Pimpinan dan anggota 45 (org) x 12 (bln) x Rp 500.000,00



1	2	3	4
01.01 1 1 04 03 1	Bantuan BBM Pimpinan dan Anggota	304.949.000,00	- Bantuan BBM Pimpinan dan Anggota 45 (org) x 12 (bin) x Rp 564.720,00
01 01 1 1 05	1 Biaya Bantuan rumah Jabatan, Pendidikan dan asuransi	2.902.600.000,00	
01 01 1 1 05 01 1	Bantuan rumah jabatan Pimpinan DPRD	24.600.000,00	Bantuan rumah jabatan Pimpinan DPRD : - Ketua DPRD 1 (org) x 12 (bin) x Rp 550.000,00 - Wakil Ketua DPRD 3 (org) x 12 (bin) x Rp 500.000,00
01 01 1 1 05 02 1	Bantuan kegiatan pendidikan	200.000.000,00	
01 01 1 1 05 03 1	Asuransi Tanda Penghargaan DPRD	108.000.000,00	- Asuransi Tanda Penghargaan Pimpinan dan Anggota DPRD 45 (org) x 12 (bin) x Rp 200.000,00
01 01 1 1 05 04 1	Asuransi Idaman plus Kecelakaan diri	450.000.000,00	- Asuransi Idaman plus kecelakaan diri Pimpinan dan Anggota DPRD 45 (org) x Rp 10.000.000,00
01 01 1 1 05 05 1	Asuransi Kesehatan	1.800.000.000,00	- Untuk Pimpinan dan Anggota Dewan
01 01 1 1 05 06 1	Biaya Penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah	300.000.000,00	
01 01 1 1 05 07 1	Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia	20.000.000,00	